



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT PROVINSI SUMATERA BARAT

PADANG, 2020

DAFTAR ISI

	Hal
<i>Daftar isi</i>	<i>i</i>
<i>Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019</i>	
<i>1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan</i>	<i>1</i>
<i>2. Outcome Program</i>	<i>7</i>
<i>3. Capaian Indikator Kinerja</i>	<i>8</i>
<i>4. Permasalahan dan Solusi</i>	<i>9</i>
<i>5. Penghargaan Nasional Yang Diterima</i>	<i>14</i>
<i>Lampiran</i>	

BAB I

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018. Biro Organisasi berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum dan Kesra yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.

Biro Organisasi pada Tahun Anggaran 2019 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang termuat pada rencana strategis Biro Organisasi tahun 2016-2021 dengan 9 (Sembilan) Program dengan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan, dan adapun program dan kegiatan tersebut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Administrasi Perkantoran tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 719.362.654,- dan terealisasi sebesar Rp. 693.807.310,- dengan persentase 96,45%.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pada program ini tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 138.004.762,- terealisasi sebesar Rp.102.348.602,- dengan persentase 74,16%.

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pada program ini tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 148.451.946,- terealisasi sebesar Rp.145.809.496,- dengan persentase 98,22%.

4. PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada program ini tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 372.031.400,- terealisasi sebesar Rp.348.341.836,- dengan persentase 93,63%, dari program ini dapat dilaksanakan :

- Monev pencapaian target perjanjian kinerjanya sebanyak 50 OPD
- Penyusunan dokumen perjanjian kinerja sebanyak 1 dokumen
- Bimbingan teknis akuntabilitas dengan peserta sebanyak 50 orang
- Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 dokumen.

5. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR

Pada program ini tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 188.277.400,- terealisasi sebesar Rp.172.474.750,- dengan persentase 91,61%, dari program ini dapat dilaksanakan :

- Pelayanan terhadap PNS dilingkungan Sekretariat Daerah sebanyak 520 orang
- Evaluasi disiplin PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Tersedianya laporan data kepegawaian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 dokumen.
- Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah dengan peserta 69 orang.

6. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

Pada program ini tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 325.396.800,- terealisasi sebesar Rp.295.277.896,- dengan persentase 90,74%, dari program ini dapat dilaksanakan :

- Bimbingan untuk penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat dengan peserta 60 orang.
- Sosialisasi Reformasi Birokrasi dengan peserta sebanyak 75 orang.

7. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pada program ini tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 111.602.850,- terealisasi sebesar Rp.110.067.665,- dengan persentase 98,62%, dari program ini dapat dilaksanakan :

- Pembinaan terhadap Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
- Bimbingan terhadap Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan berbasis SP4N-LAPOR.

8. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH

Pada program ini tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 1.008.647.410,- terealisasi sebesar Rp.990.287.160,- dengan persentase 98,18%, dari program ini dapat dilaksanakan :

- Penyusunan produk hukum daerah terkait Kelembagaan Perangkat Daerah
- Penyesuaian dokumen Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Jabatan Perangkat Daerah sebanyak 15 dokumen dan 19 kab/kota
- Penyusunan rekomendasi terhadap Ranperda Kelembagaan Kab/Kota yang difasilitasi sebanyak 7 kab/kota
- Penyusunan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.

9. PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada program ini tahun 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 441.258.416,- terelisasi sebesar Rp.431.990.367,- dengan persentase 97,90%, dari program ini dapat dilaksanakan :

- Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan peserta 40 orang

- Penyelenggaraan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik dengan peserta sebanyak 25 Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota
- Penyusunan /perbaikan SOP OPD sebanyak 4 SOP OPD, dan penyusunan konsep Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Anggaran dan Realisasi Program /Kegiatan
Biro Organisasi Tahun 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 719,362,654	Rp. 693,807,310	96.45%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			
6	Penyediaan Makanan dan Minuman			
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 138,004,762	Rp. 102,348,602	74.16%
1	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi			
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional			
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor			
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi			
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 148,451,946	Rp. 145,809,496	98.22%
1	Penatausahaan Keuangan SKPD			
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD			
IV	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp. 372,031,400	Rp. 348,341,836	93.63%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat			
2	Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar			
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov Sumatera Barat Tahun 2018			
4	Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar			
V	MANAJEMEN PERUBAHAN	Rp. 325,396,800	Rp. 295,277,896	90.74%
1	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemprov. Sumbar			
2	Sosialisasi Reformasi Birokrasi			
VI	PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Rp. 188,277,400	Rp. 172,474,750	91.61%
1	Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar			

2	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian			
3	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat			
4	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			
VII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp. 111,602,850	Rp. 110,067,665	98.62%
1	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota			
VIII	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Rp. 1,008,647,410	Rp. 990,287,160	98.18%
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat			
2	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota			
3	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota			
4	Penataan Jabatan Perangkat Daerah			
IX	PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 441,258,416	Rp. 431,990,367	97.90%
1	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi			
2	Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota			
3	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik			
	Total	Rp. 3,453,033,638	Rp. 3,290,405,082	95.29%

B. OUTCAME PROGRAM

Dengan dilaksanakannya program/kegiatan yang mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Biro Organisasi tahun 2019, secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja organisasi Biro Organisasi tahun 2019 berjalan dengan baik dan hasil dari pelaksanaan program tersebut adalah :

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Akuntabel (skor hasil evaluasi AKIP) dengan target predikat BB, dan pada tahun 2019 target tersebut dapat terpenuhi, sedangkan untuk persentase OPD yang telah mendapatkan evaluasi SAKIP A pada tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP A sebanyak 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan :
 - Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV dan staf di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - Pelaksanaan pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
 - Bimbingan Teknis Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .
2. Untuk mencapai indeks reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan reformasi birokrasi secara terencana, melembaga, dan konsisten serta berkelanjutan perlu diterapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan ditindaklanjuti dengan program aksi pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.
3. Dalam rangka meningkatkan fungsi Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara perkesinambungan telah dilaksanakan :
 - Pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

- Pembinaan survey kepuasan masyarakat terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat.
 - Pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis SP4N-LAPOR dengan pendampingan dari UNDP dan KOICA. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi percontohan dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
 - Melaksanakan MOU antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
5. Mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan rewiuw Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kepada penataan kelembagaan, dan untuk meningkatkan fungsi ketatalaksanaan pemerintah daerah perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018.

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sesuai dengan hasil yang akan diukur dan indikator harus merupakan suatu ukuran dari suatu keberhasilan. Sehubungan dengan hal tersebut biro organisasi telah melakukan penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target dan realisasi serta capaian tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	5	3	60
2.	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	70	80	114,28
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
Jumlah Capaian						374,28
Rata - rata capaian indikator kinerja						93,57

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penataan Kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan :

Pada tahun 2016 Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan permasalahan terjadi adalah kurang optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah

pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Disamping itu permasalahan lainnya adalah :

- a. Masih adanya OPD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya OPD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke OPD lain yang mengakibatkan turunnya type OPD.
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja

Solusi :

Solusi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan sharing informasi dengan Kementerian dalam negeri serta Kementerian terkait Khususnya yang berhubungan dengan pembahasan penataan kelembagaan provinsi dan kab/kota serta melakukan studi kooperatif dengan Provinsi lain yang dianggap berhasil dalam pemetaan kelembagaan.
- b. Melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi, terkait pembahasan indikator urusan kewenangan dan melaksanakan rakornis kelembagaan provinsi dan kabupaten kota untuk peningkatan pemahaman aparatur dalam melaksanakan proses penataan kelembagaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Melakukan bimbingan teknis Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.

2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

a. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah masih belum optimalnya sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR oleh masyarakat guna penyampaian keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dikarenakan keterbatasan anggaran, dan permasalahan lainnya adalah

belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk yang telah disampaikan oleh admin SP4N-LAPOR kepada pejabat penghubung yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Solusi :

1. Melaksanakan bimbingan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan pengaduan pelayanan public berbasis aplikasi SP4N-LAPOR.
2. Melaksanakan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap penerapan pengelola pengaduan pelayanan publik berbasis aplikasi SP4N-LAPOR dan melakukan study kooperatif ke provinsi lain yang telah melakukan pengelola pengaduan pelayanan publik berbasis aplikasi SP4N-LAPOR dengan baik.

b. Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik

Permasalahan :

Permasalahan dalam melaksanakan pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat masih dirasakan adanya kekurangan terutama dalam menciptakan inovasi dalam mengatasi permasalahan dan mengembangkan fungsi pelayanan publik. Permasalahan lainnya adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten / Kota masih belum sempurna dan masih adanya inovasi yang ditampilkan belum menyentuh kepada masyarakat secara utuh terhadap pelayanan yang diterima masyarakat.

Solusi :

1. Mengadakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat
2. Menghimbau Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) untuk mengikuti seleksi Sistem Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional.
3. Melakukan pembinaan pelayanan publik terutama yang terkait kepada penerapan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

c. Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah

Permasalahan :

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya kembali dilakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

Solusi :

1. Melaksanakan evaluasi dari Standar Operasional Prosedur OPD sesuai dengan penataan kelembagaan OPD.
2. Melaksanakan bimbingan langsung kepada OPD dalam pelaksanaan teknis penyusunan SOP.
3. Melaksanakan pembinaan penyusunan dan penerapan SOP kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota.

d. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan :

Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten, disamping itu masih rendahnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat struktural dan seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja masing-masing perangkat daerahnya.

- b. Masih perlunya keselarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.

Solusi :

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat.

e. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan :

Peran birokrasi pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sangat strategis, maka untuk itu perlu dilakukan perubahan atau penataan birokrasi melalui suatu program, yaitu Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan keprofesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum sesuai sebagaimana yang diharapkan, persoalan yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi tersebut dikarenakan belum semuanya Organisasi Perangkat Daerah memahami tentang penerapan rencana aksinya. Kendala lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Konsistensi kebijakan yang terkait dengan aspek reformasi birokrasi masih kurang.
- b. Evaluasi reformasi birokrasi dan indikatornya belum dipahami dengan baik sehingga target nilai dari penilaian reformasi birokrasi dalam kategori baik sulit untuk ditetapkan.
- c. Belum adanya evaluasi terhadap program aksi reformasi birokrasi pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Belum adanya laporan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan dari kelompok kerja Reformasi Birokrasi.

Solusi :

Solusi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi adalah melaksanakan sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pejabat eselon III dan eselon IV, serta melakukan bimbingan untuk penilaian mandiri reformasi birokrasi bagi organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

E. PENGHARGAAN NASIONAL YANG DITERIMA

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas pemerintah daerah, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang hasilnya telah diumumkan pada tahun 2019 dengan perolehan nilai **74,76** atau predikat **BB**. Hasil penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai dan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang baik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk evaluasi laporan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019, Biro Organisasi memperoleh predikat **BB**.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 ini disusun dan disampaikan sebagai bahan dalam rangka penyusunan LKPJ Gubernur Sumatera Barat.

Padang, Januari 2020

KEPALA BIRO ORGANISASI



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19730524 199303 1 003